



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD)**

JALAN SALOTUNGO TELP. (0484) 21091 WATANSOPPENG KODE POS : 90812

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 12/SK/DPMD/I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR UTAMA

**DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG,**

- Menimbang : 1. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 17 Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG



ANDI AGUS MONGKI, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19710817 199101 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOPPENG

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1.	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kelembagaan masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Surat Keputusan (SK) Penetapan Juara	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kelembagaan masyarakat}}{\text{Jumlah lembaga masyarakat}} \times 100$	
2.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Jumlah UNIT BUMDesa yang aktif	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Surat Keputusan (SK) Pendirian Bumdes	$\frac{\text{Jumlah Unit BUMDesa yang aktif}}{\text{Jumlah Unit Bumdesa}} \times 100$	
3.	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah aparat desa yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	Bidang Pemerintahan Desa	49 Desa	$\frac{\text{Jumlah aparat pemerintah desa yang mempunyai kapasitas}}{\text{Jumlah aparat desa}} \times 100$	
4.	Meningkatnya perencanaan dalam pembangunan desa	Jumlah desa yang memiliki RKPDesa/APBDesa	Bidang Pemerintahan Desa	49 Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang memiliki RKPDesa/APBDesa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	
5.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	Sekretariat	Kuisisioner	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang puas terhadap pelayanan admin istrasi umum dan keuangan}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	
6.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Sekretariat	Buku Inventaris Barang	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana kantor}} \times 100$	

Watansoppeng, 17 Januari 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG**

ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19710817 199101 1 001